

BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Menurut Harsanti (2011) CSR adalah suatu rancangan organisasi yang memperlihatkan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat dengan mengambil suatu tanggung jawab dari dampak kegiatan operasional perusahaan tersebut. Pada operasi bisnis, perusahaan akan memiliki kontrak sosial langsung dengan pemangku kepentingan seperti karyawan, investor, pemegang saham dan lain-lain. Dengan demikian, pemangku kepentingan mengharapkan mereka dapat menjalankan bisnis atas dasar kepercayaan dan etika. Salah satu cara untuk memberikan hasil dari pelaksanaan CSR kepada para pemangku kepentingan adalah dengan melaporkan serta mengungkapkan informasi CSR sebagai pengungkapan sukarela baik dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan.

Konsep CSR pertama kali diperkenalkan pada 1990-an oleh perusahaan multinasional, tetapi tidak ada perhatian yang diberikan pada waktu itu. Bencana lingkungan dan pemanasan global telah meningkatkan kesadaran tanggung jawab lingkungan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan mengambil kewajiban sebanyak mungkin terhadap masalah lingkungan dan mencerminkan harapan serta keprihatinan sosial yang berkembang (Juhmani, 2014).

Organisasi yang memiliki peran paling aktif dalam ekonomi pasar, tidak dapat membatasi perhatian mereka hanya pada tujuan ekonomi, tetapi harus fokus pada pendekatan kualitatif yang lebih luas dan memperhatikan praktik CSR melalui pelaporan internal dan eksternal. Perkembangan CSR *disclosure* terjadi pada pertengahan 1990, saat banyaknya perusahaan memiliki tren berupa publikasi laporan tahunan. Ketika praktik pelaporan seperti itu menjadi luas untuk dilaporkan, pengungkapan CSR mulai dilaksanakan oleh beberapa organisasi. Sehingga, perusahaan mulai mempublikasikannya dalam laporan sosial dan lingkungan yang terpisah. Akibatnya, pengungkapan lingkungan perusahaan semakin menjadi masalah penting bagi investor perusahaan, pembuat kebijakan publik dan masyarakat umum (Juhmani, 2014).

Pengungkapan CSR ini penting untuk memberikan informasi kinerja lingkungan dan mempengaruhi pasar modal. Oleh karena itu, investor korporat dan pemangku kepentingan lainnya perlu menggunakan informasi lingkungan dalam pengambilan keputusan mereka. Dalam menanggapi kekhawatiran investor dan pemangku kepentingan lain tentang kebijakan lingkungan perusahaan, banyak perusahaan secara sukarela meningkatkan tingkat pengungkapan sosial dan lingkungan mereka melalui berbagai sumber dan media. Namun, media yang paling terkenal dan banyak digunakan adalah laporan dan situs *web* tahunan (Villiers & Staden, 2011).

Suatu entitas menggunakan pengungkapan CSR sebagai instrumen untuk mendistribusikan informasi dan mengkomunikasikan akuntabilitas dengan menunjukkan visi mereka, guna masa depan serta memperhitungkan kinerja masa lalu (Branco & Rodrigues, 2008). Branco dan Rodrigues (2008) menyatakan bahwa untuk mencapai, mengkomunikasikan dan meyakinkan publik atas pemenuhan harapan sosial mereka. Pengungkapan informasi CSR adalah pendekatan kritis yang perlu diterapkan oleh perusahaan. Pengembalian yang menguntungkan diharapkan dari investasi ini. Perusahaan akan termotivasi untuk melakukan investasi lebih banyak dalam kegiatan CSR dengan tujuan mempertahankan nama baik perusahaan sebagai entitas yang memiliki kewajiban terhadap sosial.

Suatu entitas cenderung melaporkan berita yang lebih positif dalam memproyeksikan perilaku etis, meskipun melaporkan keseimbangan perhatian pada berita baik dan buruk terhadap informasi yang bermanfaat bagi kredibilitas pelaporan CSR. Suatu perusahaan yang secara selektif mengungkapkan berita baik sambil mempertahankan berita buruk yang dapat menciptakan kesan positif yang menyesatkan tentang kinerja lingkungan yang sebenarnya, dikenal dengan *greenwasher* (Delmas & Burbano, 2011).

Teori tentang program pengungkapan CSR sudah banyak dikembangkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti: *International Organization for Standardization* (ISO) 26000, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), *Global Reporting Initiative* (GRI). ISO 26000 merupakan program CSR yang paling sering digunakan sebagai

indikator pengungkapan CSR saat ini, disamping itu ISO 26000 juga merupakan salah satu indikator yang telah disetujui sebagai pengungkapan CSR di Indonesia (Jalal, 2010).

Pedoman program ISO 26000 merupakan suatu standarisasi tentang pengungkapan CSR yang dikeluarkan oleh organisasi ISO di tahun 2010. Standarisasi ini adalah hasil dari proses riset dan persetujuan standar dengan kelompok kerja internasional dan komite nasional pada lebih dari 90 negara dan melalui proses penerapan dan pengembangan selama 5 tahun. Program ISO 26000 ini mengemukakan bahwa sifat CSR adalah fitur yang sangat kompleks dan memerlukan analisis yang memperhitungkan berbagai faktor, tindakan dan fitur. Akibatnya, sangat sulit untuk mengklasifikasikan sepenuhnya perusahaan berdasarkan tingkat tanggung jawab sosialnya dengan memperhitungkan daftar faktor lengkap. Ini adalah tantangan utama dalam proses negosiasi untuk standar. ISO menghindari tantangan ini dengan menyatukan semua aspek penting dari tanggung jawab sosial namun dalam bentuk pedoman standarisasi (Smeureanu & Isaila, 2011).

Aspek kunci dari ISO 26000 adalah menetapkan prinsip-prinsip panduan yang bertentangan dengan spesifikasi untuk sertifikasi. Dengan demikian tidak ada organisasi yang akan menjadi ISO 26000 bersertifikat, seperti halnya dengan standar lain. Dengan kata lain tujuan ISO 26000 bukan untuk mendefinisikan sistem melalui serangkaian persyaratan. ISO 26000 hanya mengembangkan bentuk-bentuk praktis tanggung jawab sosial, dirancang untuk mendukung organisasi yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (Juhmani, 2014).

Menurut Smith (2011), ISO telah menciptakan organisasi internasional standar untuk tanggung jawab sosial sektor swasta (perusahaan) dan publik organisasi. ISO 26000 menetapkan tujuh subjek inti tanggung jawab sosial, yang semuanya adalah bagian dari definisi CSR terkini yaitu:

1. Tata kelola organisasi;
2. Hak asasi Manusia;
3. Praktik Ketenagakerjaan;
4. Lingkungan;
5. Praktik Kegiatan Institusi yang Sehat;

6. Konsumen; dan
7. Pengembangan Masyarakat.

Tujuh subjek inti ini pada dasarnya adalah heuristik untuk diikuti oleh perusahaan, yang dapat bermanfaat bagi perusahaan dalam membuat program di sekitar area yang menurut ISO harus diwakili oleh CSR. Praktik ini konsisten dengan standar ISO lainnya untuk membantu perusahaan dengan meningkatkan proses dan mengimplementasikan program kepatuhan. Tujuh subjek inti memiliki fokus besar pada manajemen pemangku kepentingan dan perilaku etis. Standar ini dapat memberikan beberapa panduan yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan (GRI, 2002).

GRI dijadikan sebagai salah pedoman dalam pengungkapan CSR. Dalam pengungkapan GRI ini indikator yang dipakai dalam pengungkapan CSR meliputi tata kelola organisasi, pengungkapan strategi, profil organisasi dan juga manajemen kinerja. Indikator yang dicantumkan pada pedoman GRI (GRI, 2002), yakni :

1. Indikator Kinerja Sosial yang terdiri dari 40 item pengungkapan.
2. Indikator Kinerja Lingkungan meliputi 30 indikator pengungkapan; dan
3. Indikator Kinerja Ekonomi terdapat 9 indikator pengungkapan;

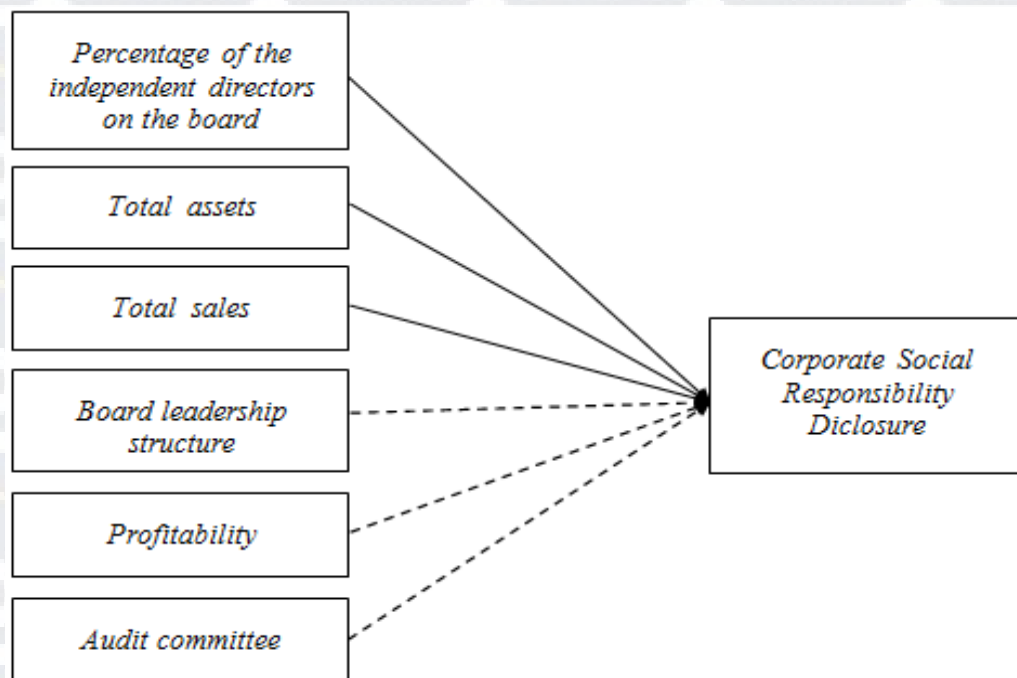
Cara penilaian GRI dilakukan dengan memberikan nilai 1 pada setiap indikator yang diungkapkan, setelah indikator tersebut didapatkan baru dijumlahkan keseluruhan nilai yang didapatkan dari informasi pengungkapan CSR (GRI, 2002).

Pedoman pengungkapan PROPER adalah pengungkapan CSR yang diterapkan oleh kementerian lingkungan hidup di negara Indonesia. Pengungkapan PROPER diwajibkan bagi perusahaan yang menciptakan limbah dari hasil produksi maupun operasional perusahaan mereka. Program PROPER mendorong para perusahaan untuk memberikan pengungkapan CSR yang dilakukan terhadap lingkungan seperti pengendalian pencemaran air, pengolahan limbah B3 sampai dengan pengendalian pencemaran laut. Hasil dari pengungkapan program PROPER ini diberikan dengan menerbitkan sertifikat kepada perusahaan dan pada sertifikat penghargaan diberikan indikasi penilaian dari program PROPER yang dilaksanakan seperti warna emas yang berarti

perusahaan memiliki kinerja penataan terbaik, warna hijau yang menandakan baik, biru yang menandakan biasa dan diperlukan peningkatan, warna merah yang menandakan kurang baik dan warna hitam yang menandakan kinerja penataan perusahaan tersebut sangat buruk dan diperlukan perbaikan segera (Juhmani, 2014).

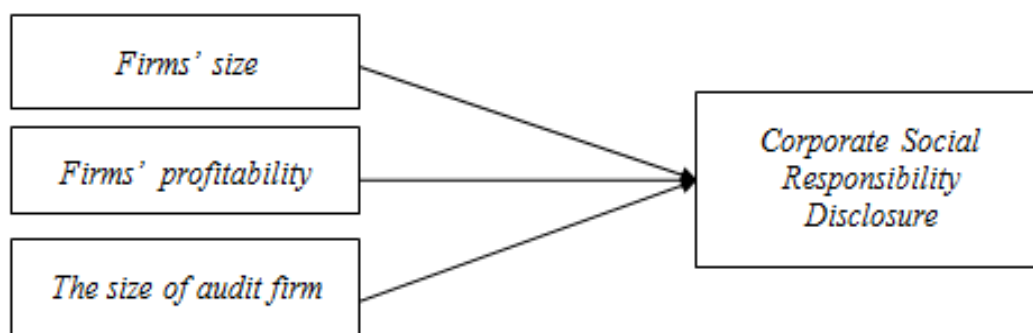
2.2 Model Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang faktor-faktor CSR telah diteliti oleh beberapa peneliti, salah satunya yaitu Rouf (2010). Studi eksplorasi yang dirancang untuk menyelidiki pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bangladesh. Data diambil dari laporan tahunan 2007 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Dhaka. Tingkat-tingkat CSR *disclosure* diukur dengan menggunakan 39 item informasi. Item pengungkapan diklasifikasikan menjadi lima kategori: (a) Informasi Lingkungan; (b) Informasi Karyawan; (c) Komunitas dan Lainnya; (d) Energi dan (e) Produk. Rouf (2010) menganalisis mengenai CSR dengan variabel independen *percentage of the independent directors on the board*, *total assets* dan *total sales*. *Board leadership structure*, *profitability* dan *audit committee* sebagai variabel kontrol.



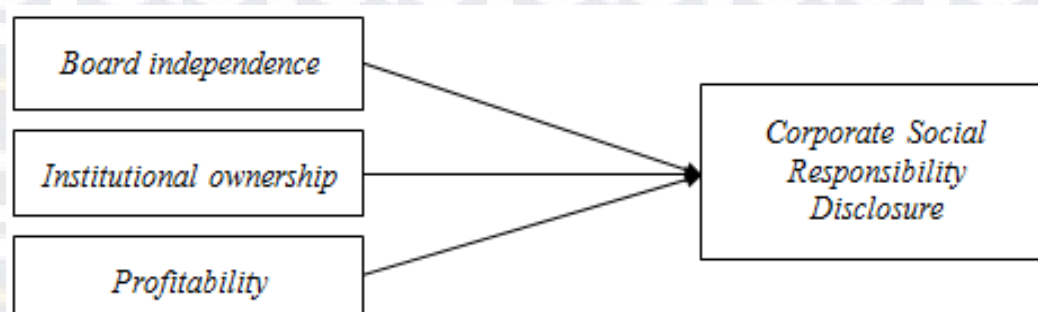
Gambar 2.1 Sumber: Rouf (2010).

Uwuigbe (2011) menggunakan perusahaan pada *Nigerian Stock Exchange* (NSE) tahun 2005-2009 sebagai sampel penelitiannya. Penelitian ini menyelidiki korelasi dari karakteristik perusahaan terhadap tingkat pengungkapan CSR instansi di sektor keuangan Nigeria. Variabel independen yang digunakan yaitu *firms' size*, *firms' profitability* dan *the size of audit firm*.



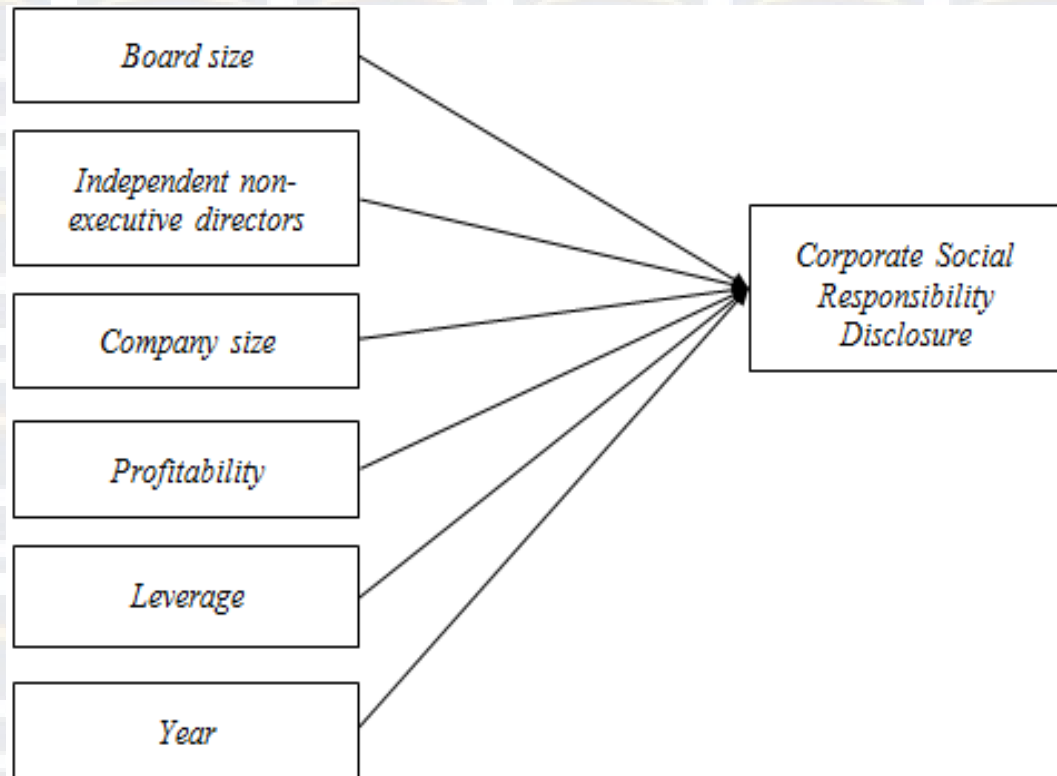
Gambar 2.2 Sumber: Uwuigbe (2011).

Mulyadi dan Anwar (2012) menggunakan sampel dari emiten yang terdaftar di *Indonesia Stock Exchange* tahun 2009. Rancangan riset ini untuk menganalisis hubungan tata kelola perusahaan dengan CSR. *Board independence*, *institutional ownership* dan *profitability* merupakan variabel independen yang dipakai pada penelitian ini.



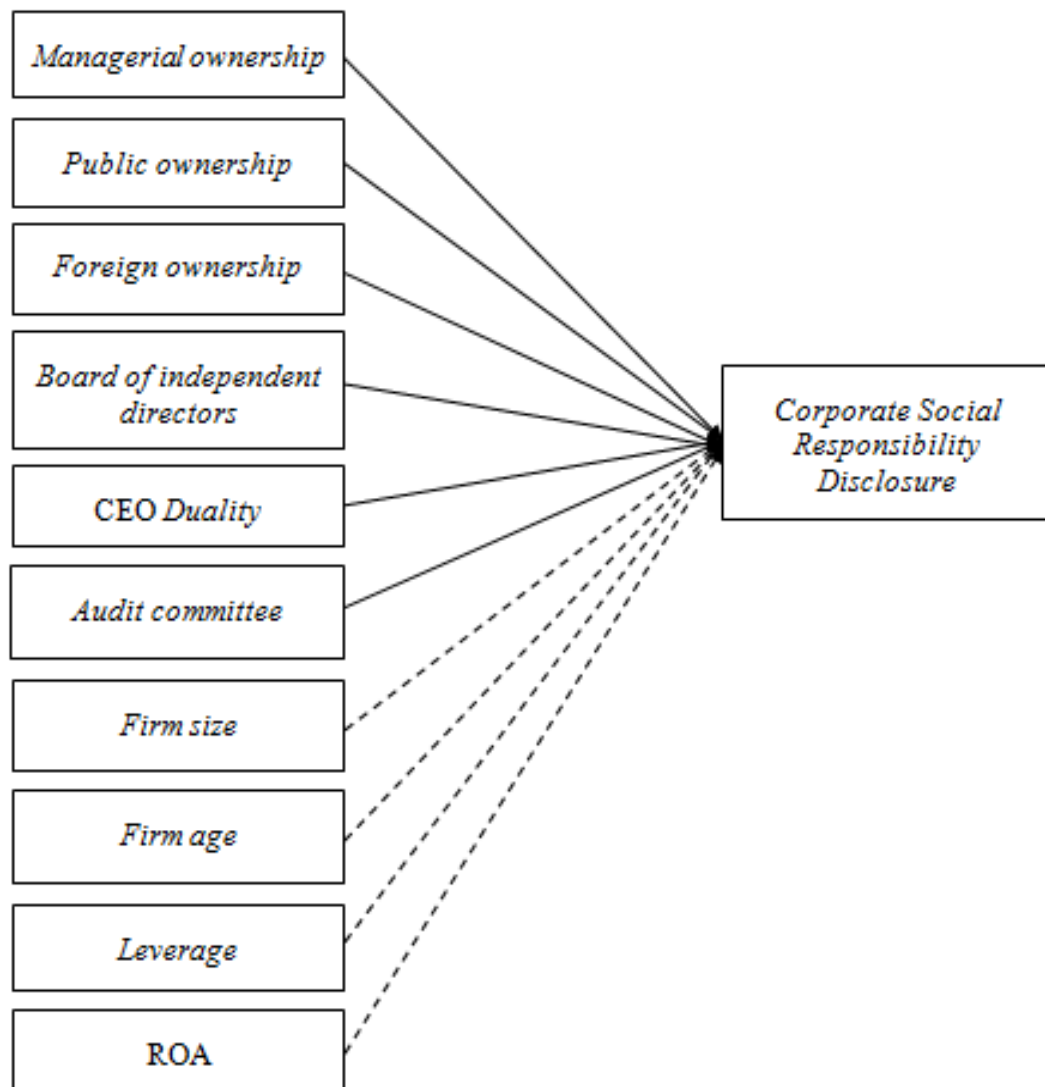
Gambar 2.3 Sumber: Mulyadi dan Anwar (2012).

Esa dan Ghazali (2012) menggunakan entitas yang terdaftar di *Malaysia Listed Companies* tahun 2005 dan 2007 sebagai sampel penelitiannya. Adanya tujuan penelitian ini untuk menyelidiki mengenai perubahan dalam tingkat pengungkapan CSR dan untuk menentukan korelasi antara tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pemerintah Malaysia. Variabel bebas yang digunakan terdiri dari *board size*, *independent non-executive directors*, *company size*, *profitability*, *leverage* dan *year*.



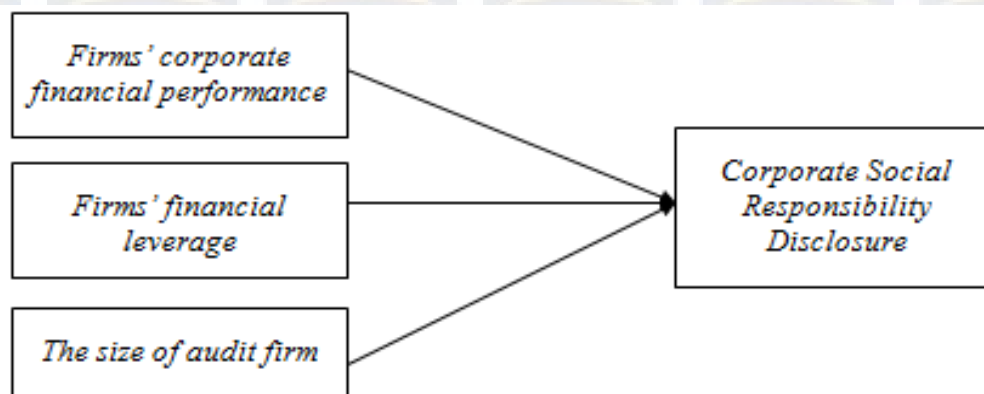
Gambar 2.4 Sumber: Esa dan Ghazali (2012).

Sampel yang digunakan pada penelitian Khan dan Muttakin (2013) merupakan emiten yang terdaftar di *Dhaka Stock Exchange* periode 2005-2009. Mengetahui tingkat korelasi antara tata kelola perusahaan dan tingkat CSR *disclosure* dalam laporan tahunan perusahaan Bangladesh merupakan tujuan dari penelitian ini.



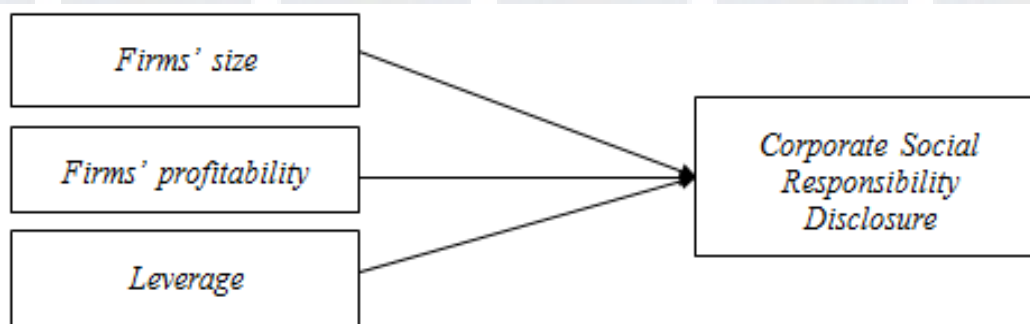
Gambar 2.5 Sumber: Khan dan Muttakin (2013).

Uwalomwa dan Egbide (2012) menggunakan perusahaan pada *Nigerian Stock Exchange* tahun 2008 untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Penelitian dilakukan untuk menyelidiki bukti empiris hubungan antara *company financial performance* dan *CSR disclosure* dari instansi yang dipilih di Nigeria. Variabel independen terdiri dari *firms' corporate financial performance*, *firms' financial leverage* dan *the size of audit firm*.



Gambar 2.6 Sumber: Uwalomwa dan Egbiide (2012).

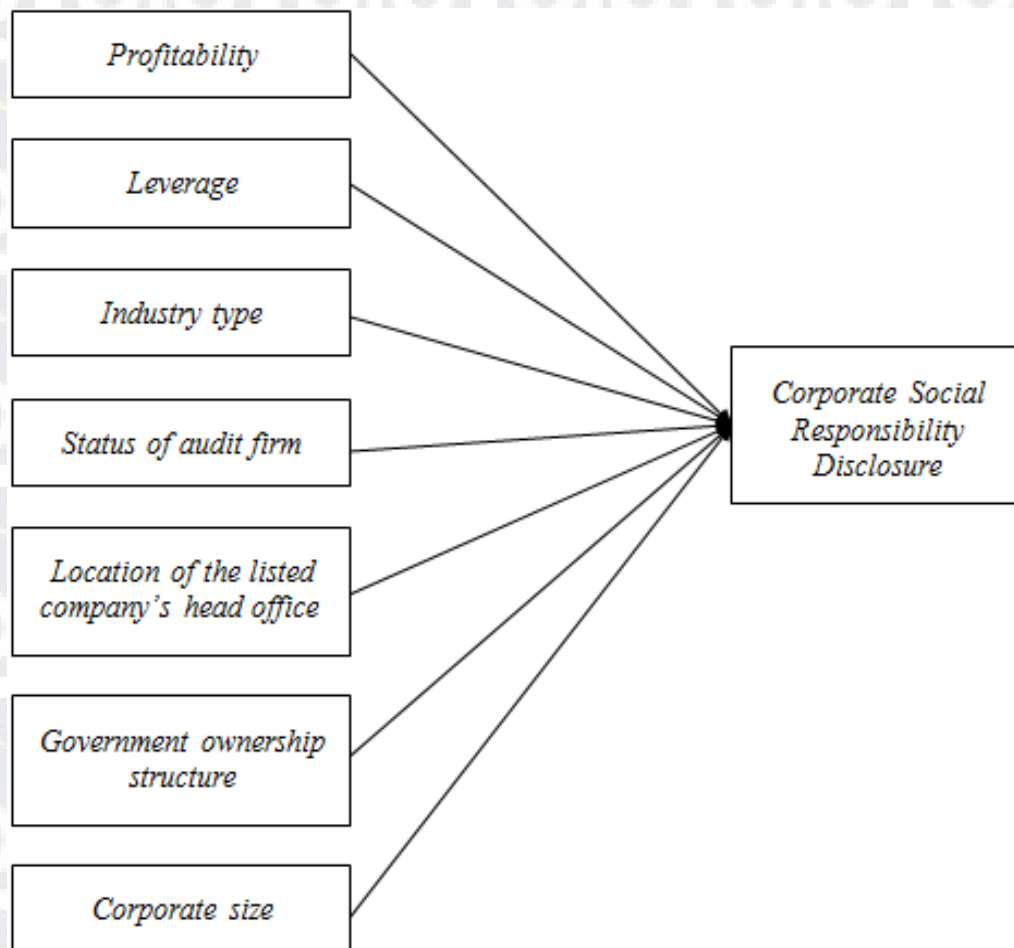
Penelitian ini dilakukan sehubungan dengan pentingnya pengungkapan CSR di Malaysia. Tujuannya ada dua dan fokus pada produk konsumen serta industri perkebunan. Pertama adalah menguji tingkat CSR *disclosure* dan kedua, untuk memastikan variabel ukuran, profitabilitas dan *leverage* perusahaan berkorelasi dengan tingkat CSR *disclosure*. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laporan tahunan 120 produk konsumen dan 34 perusahaan perkebunan yang ada di Bursa Malaysia. Sampel yang digunakan pada penelitian Chek, Mohamad, Yunus dan Norwani (2013) merupakan perusahaan pada Bursa Efek Malaysia tahun 2009. Variabel independen yang dibahas adalah *firms' size*, *firms' profitability* dan *leverage*.



Gambar 2.7 Sumber: Chek, Mohamad, Yunus dan Norwani (2013).

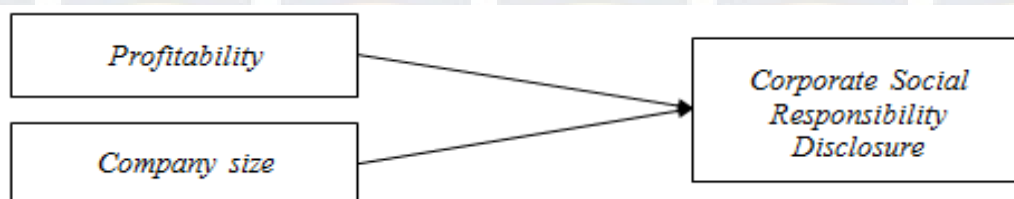
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat CSR yang dipraktikkan oleh instansi dan penentuannya dengan menganalisis perusahaan diluar sektor lembaga keuangan yang terdaftar di *Abu Dhabi Securities Exchange*. Perusahaan yang terdaftar di *Abu Dhabi Securities Exchange* tahun 2011 merupakan sampel dari penelitian ini. Variabel bebas yang digunakan yaitu *profitability*, *leverage*,

industry type, status of audit firm, location of the listed company's head office, government ownership structure serta corporate size.



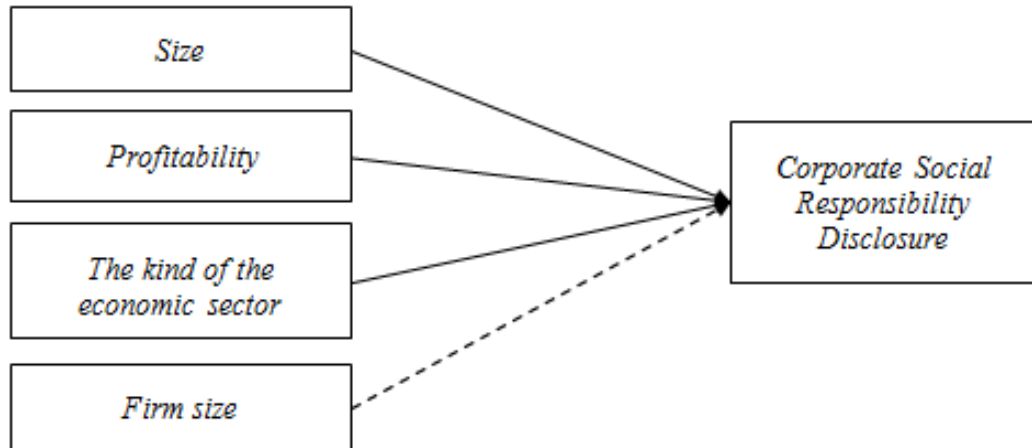
Gambar 2.8 Sumber: Bhunia, (2013).

Ebiringa, Yadirichukwu, Chigbu dan Ogochukwu (2013) meneliti menggunakan perusahaan pada *Nigerian Stock Exchange (NSE)* tahun 2011 sebagai sampel. Penelitian ini menguji korelasi antara ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap tingkat pengungkapan sosial perusahaan pada perusahaan Minyak dan Gas di Nigeria. Variabel yang digunakan adalah *profitability* dan *company size*.



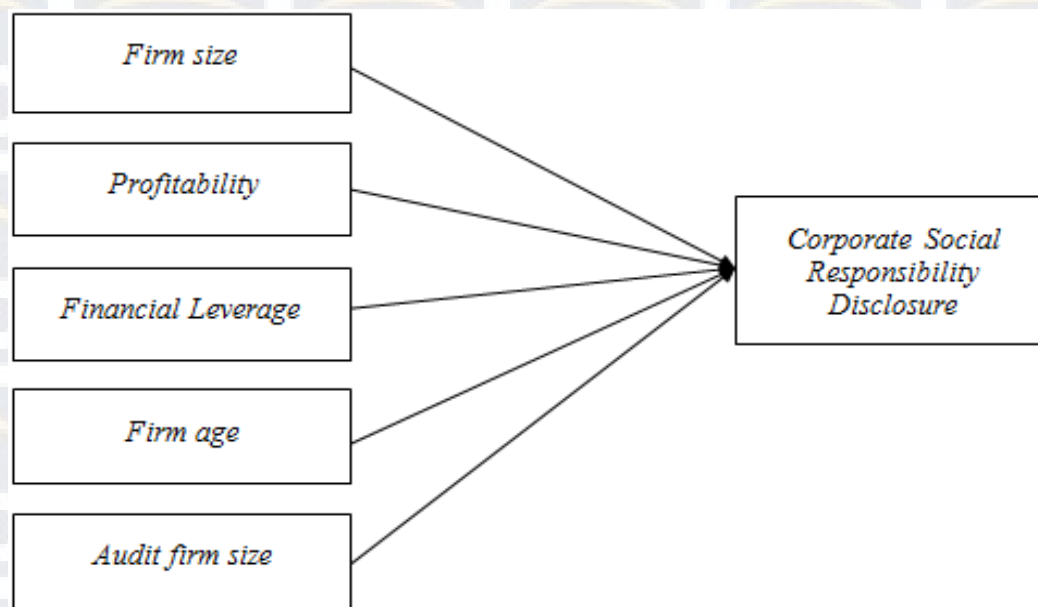
Gambar 2.9 Sumber: Ebiringa, Yadirichukwu, Chigbu dan Ogochukwu (2013).

Pada penelitian ini, peneliti sebelumnya menganalisis perusahaan yang terdaftar pada *Palestine Exchange* (PEX) tahun 2012 dengan menyelidiki tingkat dan sifat pelaporan CSR dalam laporan tahunan 48 perusahaan yang dipilih dari *Palestine Exchange* (PEX). Variabel yang dipakai adalah *size*, *profitability*, *the kind of the economic sector* dan *firm size*.



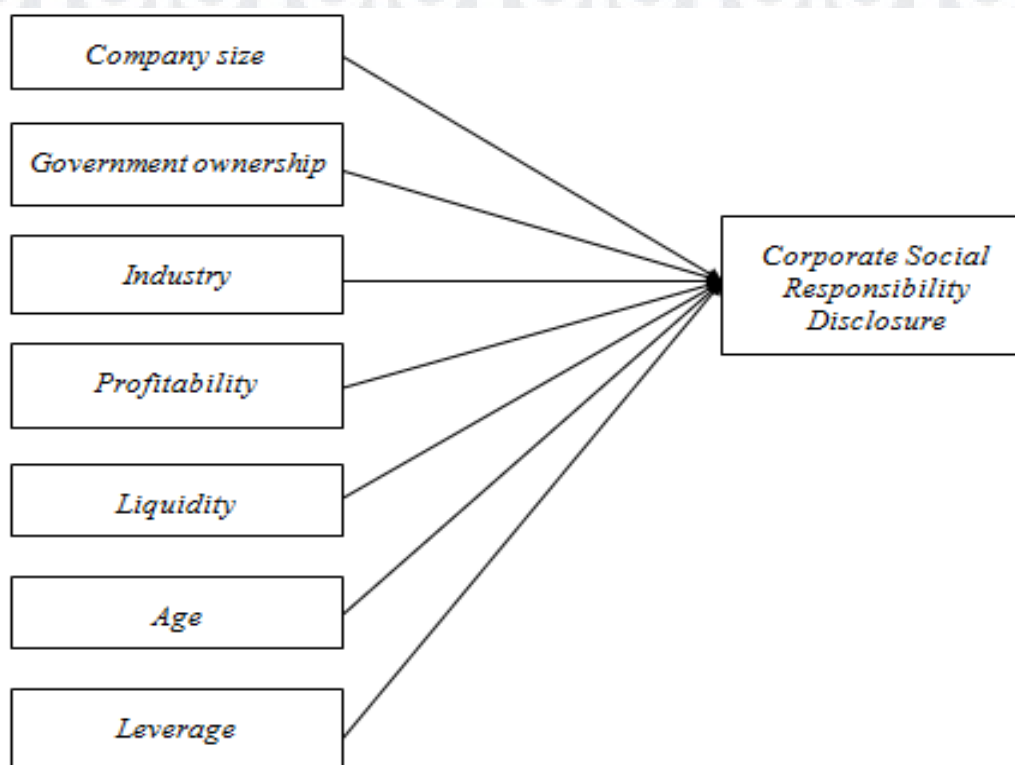
Gambar 2.10 Sumber: Alkababji (2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Juhmani (2014) menjadikan perusahaan yang terdaftar di *Bahrain Bourse* tahun 2012 sebagai sumber sampel penelitian. *Firm size*, *profitability*, *financial leverage*, *firm age* dan *audit firm size* sebagai variabel independen. Penelitian ini bertujuan menyelidiki tingkat praktik pengungkapan CSR perusahaan di situs *web* perusahaan yang terdaftar di *Bahrain Bourse*, dan juga untuk mengetahui pengaruh *firm size*, *profitability*, *financial leverage*, *firm age* dan *audit firm size* terhadap CSR.



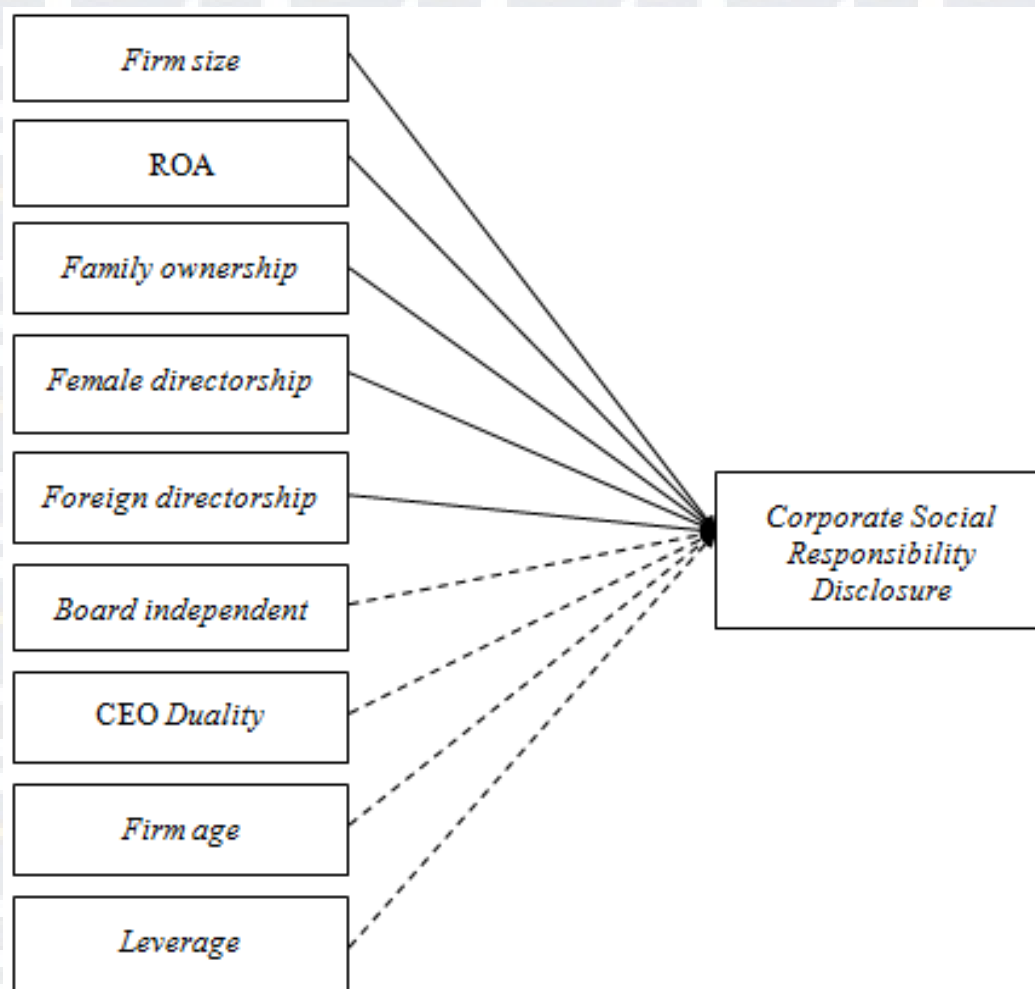
Gambar 2.11 Sumber: Juhmani (2014).

Emiten yang terdaftar pada *Kuwait Stock Exchange* (KSE) tahun 2012 dipilih sebagai sampel untuk riset ini. Variabel independen penelitian adalah *company size*, *government ownership*, *industry*, *profitability*, *liquidity*, *age* dan *leverage*. Penelitian ini mengukur korelasi dari variabel bebas yang digunakan terhadap CSR.



Gambar 2.12 Sumber: Al-Ajmi, Al-Mutairi dan Al-Duwaila (2015).

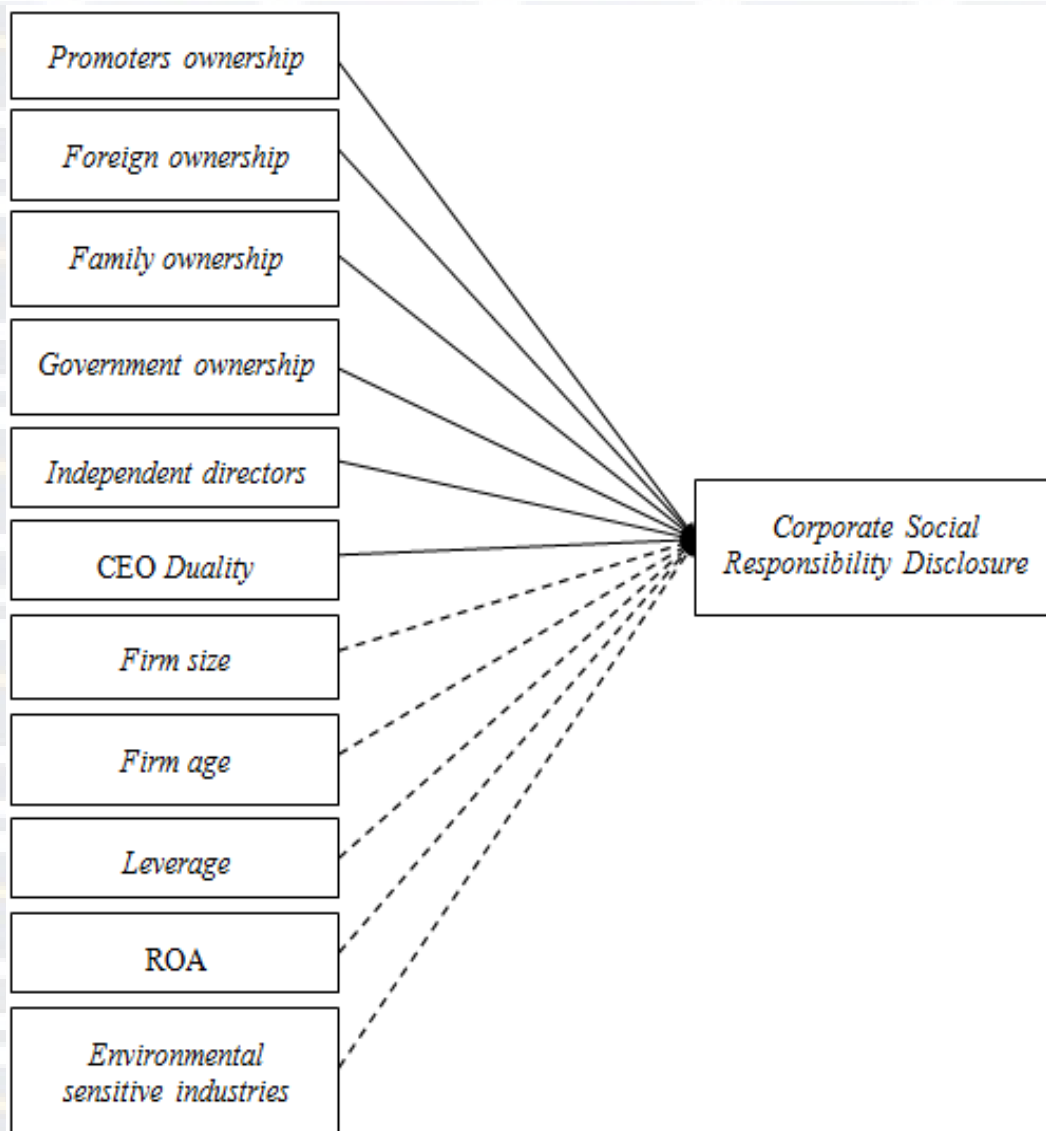
Sampel penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar di *Dhaka Stock Exchange* (DSE) tahun 2005-2009 terdiri dari 116 perusahaan negara Bangladesh yang tidak bergerak disektor lembaga keuangan. *Firm size*, ROA, *family ownership*, *female directorship*, *foreign directorship* merupakan variabel independen yang digunakan. *Board independent*, *CEO duality*, *firm age* dan *leverage* sebagai variabel kontrol. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui korelasi variabel yang disebutkan tersebut terhadap tingkat pengungkapan CSR pada negara berkembang.



Gambar 2.13 Sumber: Muttakin dan Subramaniam (2015).

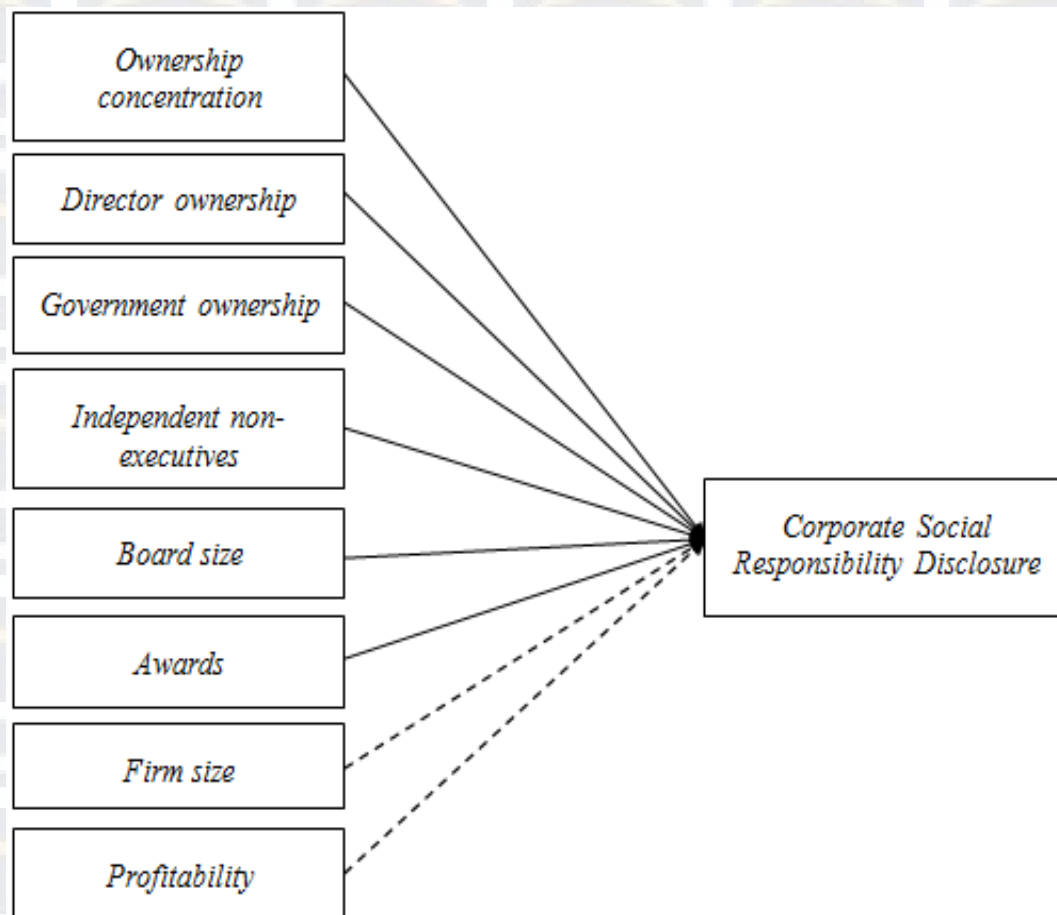
Sampel yang dipilih merupakan perusahaan yang terdaftar di *Bombay Stock Exchange* (BSE) periode 2007 hingga 2011. Terdapat variabel independen *promoters ownership*, *foreign ownership*, *family ownership*, *government ownership*, *independent directors*, *CEO duality*, sedangkan *firm size*, *firm age*, *leverage*, ROA dan *environmental sensitive industries* sebagai variabel kontrol.

Untuk penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa besar tingkat korelasi dari variabel independen yang dipilih dengan memasukan beberapa variabel kontrol terhadap CSR.



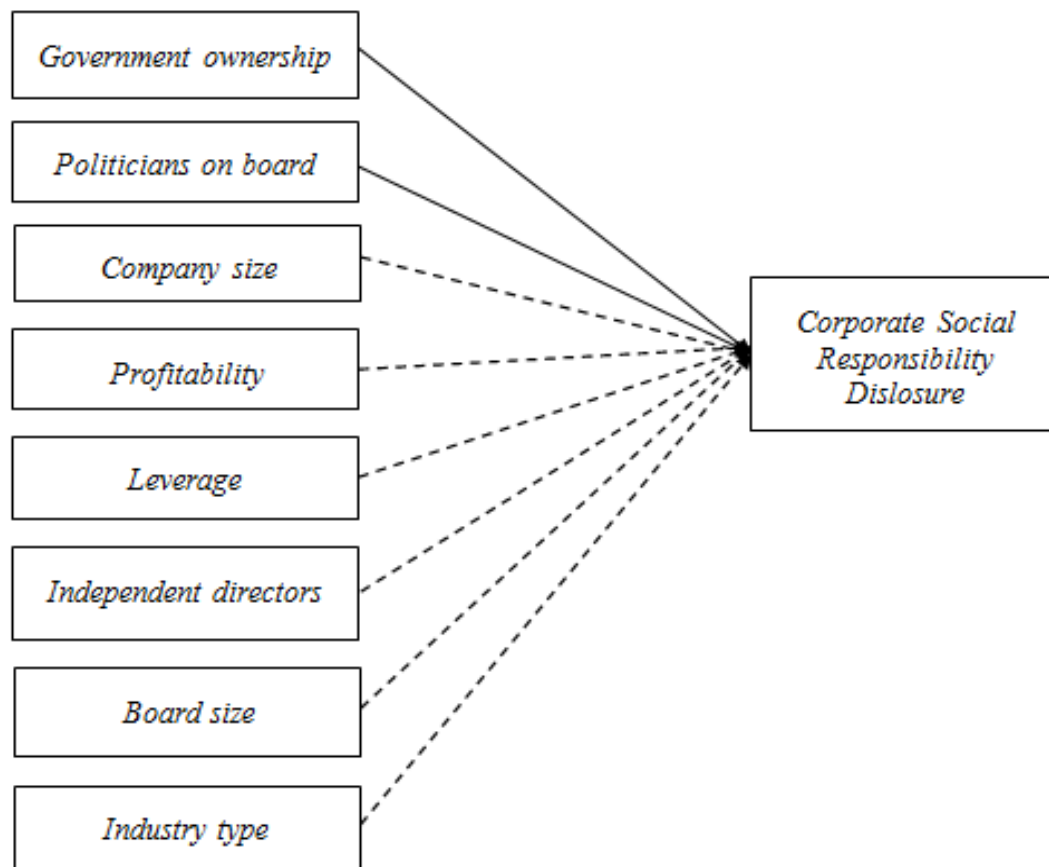
Gambar 2.14 Sumber: Muttakin dan Subramaniam (2015).

Sampel ini merupakan emiten yang terdaftar pada Bursa Efek Malaysia periode 2015. *Ownership concentration, director ownership, government ownership, independent non-executives, board size, awards* merupakan variabel independen. *Firm size* dan *profitability* sebagai variabel kontrol. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel independen yang digunakan terhadap CSR.



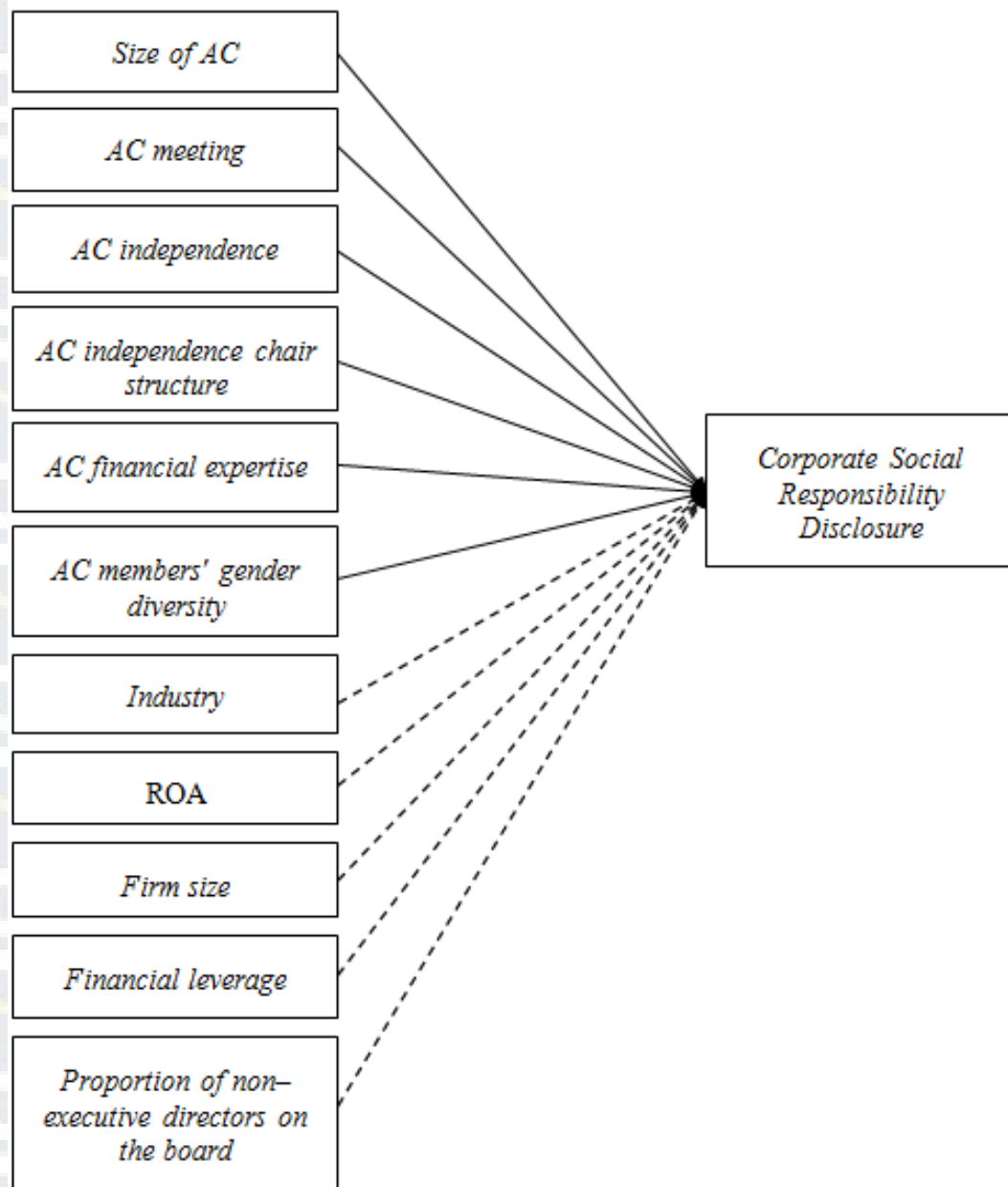
Gambar 2.15 Sumber: Laluddin (2016).

Rahman dan Ismail (2016) menjadikan 300 emiten diluar sektor keuangan dan terdaftar di Bursa Efek Malaysia tahun 2013 sebagai sampel dari penelitiannya. Variabel independen *government ownership* dan *politicians on board*, sedangkan *company size*, *profitability*, *leverage*, *independent directors*, *board size* dan *industry type* sebagai variabel kontrol. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efek koneksi politik pada pengungkapan CSR. Pengukuran koneksi politik dipisahkan menjadi dua yaitu kepemilikan pemerintah dan perwakilan politisi di dewan.



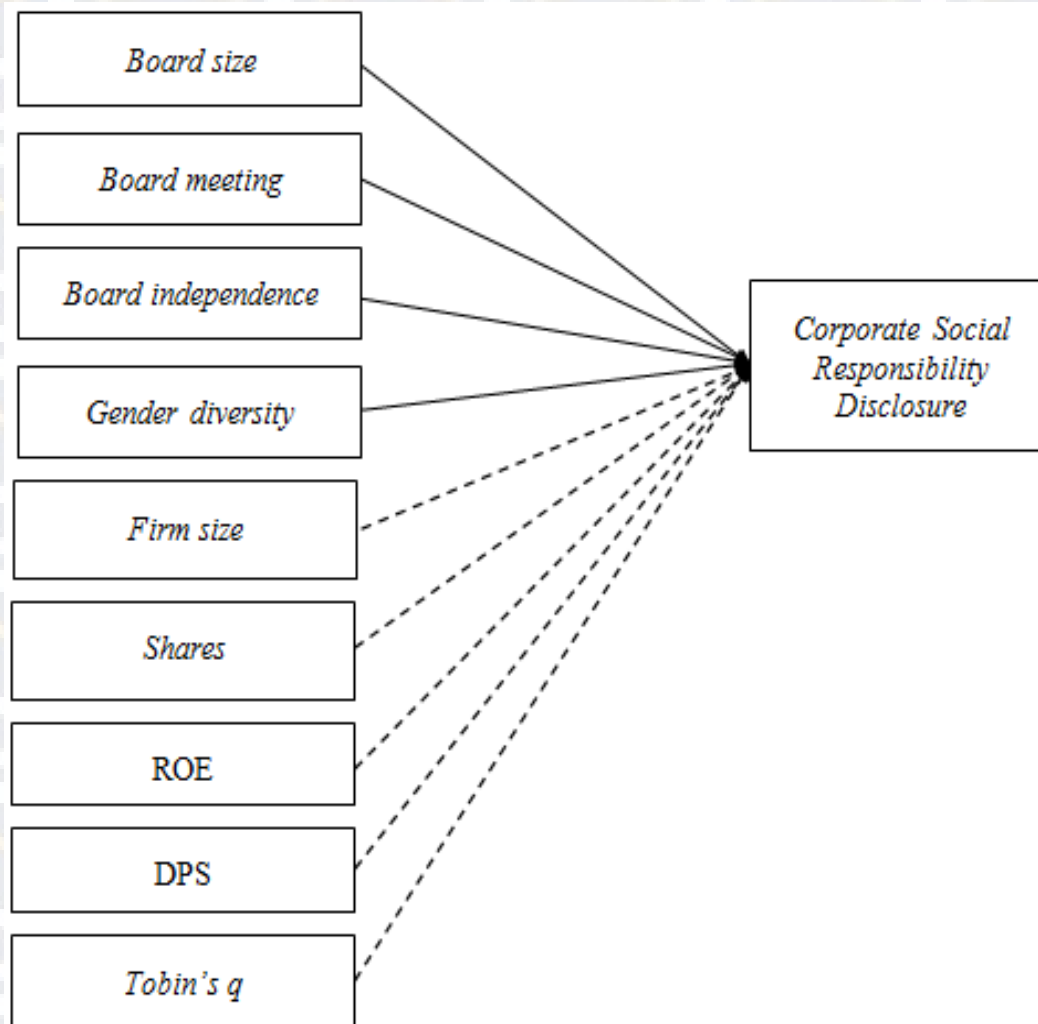
Gambar 2.16 Sumber: Rahman dan Ismail (2016).

Penelitian Appuhami dan Tashakor (2017) menjadikan 300 perusahaan yang terdaftar pada *Australia Stock Exchange (ASM)* dengan tahun pembukuan yang berakhir antara Juli 2012 dan Juni 2013. Tujuan penelitian ini adalah melihat korelasi variabel bebas yang digunakan terhadap pengungkapan CSR. Variabel independen; *size of AC, AC meeting, AC independence, AC independence chair structure, AC financial expertise, AC members' gender diversity*, sedangkan *industry, return on assets, firm size dan financial leverage dan proportion of non-executive directors on the board* sebagai variabel kontrol.



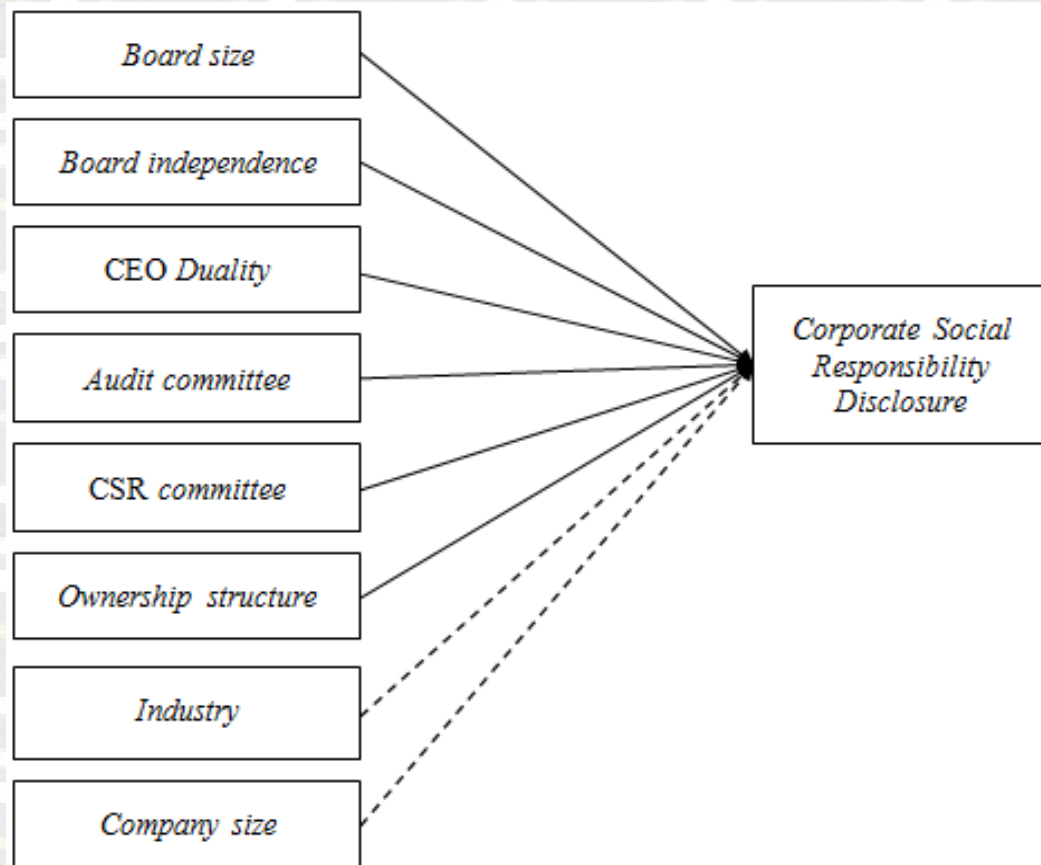
Gambar 2.17 Sumber: Appuhami dan Tashakor (2017).

Penelitian Naseem, Riaz, Rehman, Ikram dan Malik (2017) menjadikan emiten yang terdaftar di *Pakistan Stock Exchange* (PSX) periode 2009-2015 sebagai sampel pada penelitiannya. Penelitian kali ini dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi korelasi antara karakteristik tata kelola dan CSR pada instansi terbuka di PSX. Variabel *board size*, *board meeting*, *board independence* dan *gender diversity* merupakan variabel bebas yang dipilih untuk penelitian ini. *Firm size*, *shares*, ROE, DPS dan *tobin's q* dijadikan sebagai variabel kontrol.



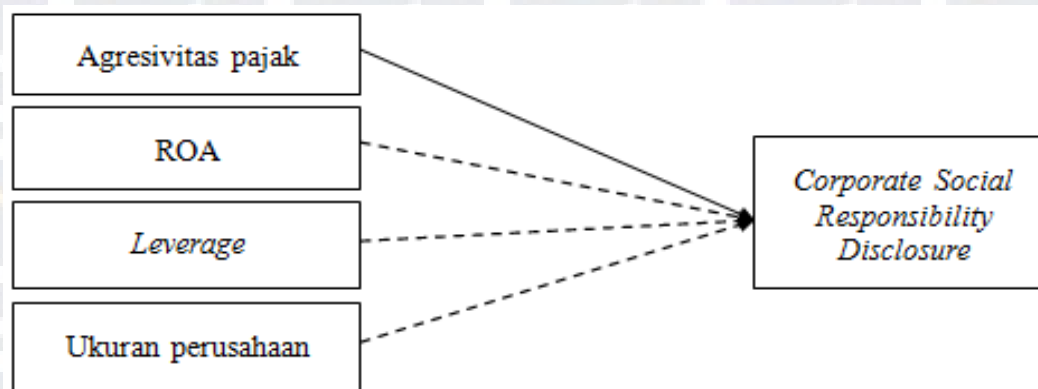
Gambar 2.18 Sumber: Naseem, Riaz, Rehman, Ikram dan Malik (2017).

Penelitian Dias, Rodrigues dan Craig (2017) menggunakan perusahaan pada Bursa Efek Portugis tahun 2011. Variabel independen; *board size*, *board independence*, *CEO duality*, *audit committee*, *CSR committee*, *ownership structure*. Variabel kontrol; *industry* dan *company size*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana karakteristik tata kelola perusahaan dalam mempengaruhi *CSR disclosure* dalam konteks krisis keuangan global. Diukur dengan 40 item indeks CSR.



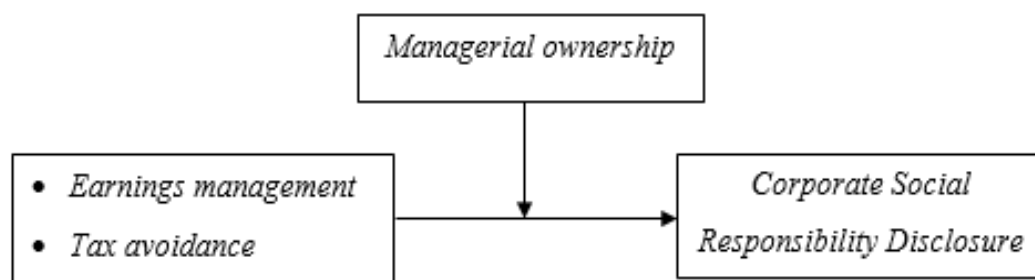
Gambar 2.19 Sumber: Dias, Rodrigues dan Craig (2017).

Sampel yang digunakan oleh Rahayu dan Darmawan (2017) adalah perusahaan yang terdaftar BEI periode 2013 hingga 2015. Variabel agresivitas pajak merupakan variabel bebas pada penelitian ini, sedangkan ROA, *leverage* dan ukuran perusahaan termasuk variabel kontrol. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis korelasi dari agresivitas perpajakan terhadap pengungkapan CSR pada perusahaan pertambangan.



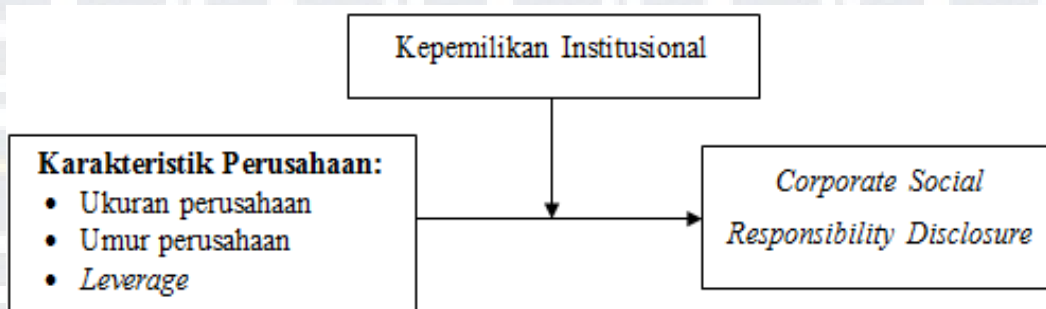
Gambar 2.20 Sumber: Rahayu dan Darmawan (2017).

Penelitian ini berfokus pada isu-isu kebijaksanaan manajerial, strategi *entrenchment manajerial* dan CSR di Malaysia. Variabel *earning management* dan *tax avoidance* merupakan variabel independen serta *managerial ownership* sebagai variabel moderasi, yang dipilih untuk dilakukan pada penelitian. Variabel ini dijadikan sebagai salah satu referensi untuk melihat korelasi dari *earning management* dan *tax avoidance* serta *managerial ownership* sebagai variabel moderasi terhadap praktik CSR yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Bursa Efek Malaysia tahun 2016.



Gambar 2.21 Sumber: Villafuerte (2015).

Niki Ratnasari dan Iren Meita (2017) meneliti mengenai korelasi dari karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan CSR dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan dan *leverage* merupakan variabel independen pada penelitian ini.



Gambar 2.22 Model penelitian pengaruh karakteristik perusahaan terhadap CSR disclosure serta kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi, sumber: Niki Ratnasari dan Iren Meita (2017).

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.3.1 Pengaruh Manajemen Laba terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Manajemen laba merupakan intervensi yang dilakukan manajemen perusahaan saat proses pelaporan keuangan eksternal, bertujuan demi salah satu keuntungan pribadi. Oleh karena itu, hal ini dilakukan melalui manipulasi dalam alat akuntansi seperti laporan posisi keuangan dan laba rugi. Meskipun perubahan ini masih dikatakan mematuhi hukum, tetapi hal ini dapat menyesatkan beberapa pemangku kepentingan. Sementara definisi ini membahas mengenai aspek oportunistik yang mendorong manajer untuk mengadopsi perilaku seperti itu, banyak orang lain menganggap manajemen laba sebagai sarana untuk membawa nilai kepada pemegang saham (Schipper, 1989).

Praktik manajemen laba akan terjadi ketika manajer mengeluarkan kebijakan manajerial dalam pelaporan pendapatan dengan mengubah informasi keuangan. Hal ini bertujuan mendistorsi nilai aktual untuk menyesatkan pemangku kepentingan atas kinerja ekonomi perusahaan. Manajer mampu mempublikasikan laporan keuangan terdistorsi dan menggunakannya untuk kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan pemangku kepentingan. Selain itu, ia juga mengemukakan bahwa manajemen laba ada ketika tujuan atau kepentingan para manajer tidak konsisten dengan pemangku kepentingan. Konflik kepentingan ini akan mempengaruhi manajer untuk mempublikasikan laporan keuangan yang terdistorsi dan menyampaikan informasi keuangan palsu (Leuz & Christian, 2017).

Terdapat korelasi manajemen laba dan CSR membuktikan bahwa manajer turut terlibat dalam perilaku diskresi ini, cenderung terlibat dalam kegiatan CSR yang lebih banyak. Mereka melakukan tindakan berkelanjutan dengan maksud untuk memastikan posisi kepemimpinannya, menghindari perubahan dalam kendali perusahaan, menghindari pemuluan yang mahal dan kepegiatan pemangku kepentingan serta berkolusi dengan para pemangku kepentingan. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperkuat strategi mereka dan terus bertindak pada kepentingan sendiri (Gargouri, Francoeur & Shabou, 2010).

Beberapa studi sebelumnya berpendapat dan melaporkan hasil yang kontras dimana perusahaan yang melakukan CSR, memiliki kemungkinan lebih rendah dalam melakukan praktik manajemen laba. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut berkewajiban untuk memproyeksikan citra yang baik dan menunjukkan bahwa manajer melepaskan tanggung jawabnya terhadap pemangku kepentingan secara optimal. Meskipun memiliki bukti empiris variabel pada korelasi antara manajemen laba dan CSR, studi yang diusulkan ini mengemukakan bahwa manajer yang ikut serta dalam praktik manajemen laba memiliki lebih banyak insentif untuk terlibat dalam kegiatan CSR lebih banyak, sehingga dapat menyembunyikan kesalahan mereka dan mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan (Salewski & Zulch, 2014).

Pada penelitian antara manajemen laba dan CSR, para ahli teori agensi menyatakan bahwa pengungkapan CSR mampu meminimalisir pertentangan kepentingan para pemegang saham dengan manajer perusahaan. Penelitian Surroca dan Tribo (2008) menunjukkan korelasi positif antara manajemen laba dengan CSR, dan berpendapat bahwa CSR dapat digunakan untuk mengumpulkan dukungan serta perlindungan dari pemangku kepentingan. Demikian pula, Pagano dan Volpin (2005), Gargouri, Hajjem, Gingras dan Brody (2010), Jo Hoje dan Harjoto (2011), Desai dan Dharmapala (2012), Scholtens dan Kang (2013), Muttakin dan Subramaniam (2015) menyatakan bahwa tingkat kinerja CSR yang berkaitan dengan lingkungan dan dimensi karyawan secara positif terkait dengan manajemen laba.

Chih, Shen dan Kang (2008), Prior *et al.* (2008), Kim (2012), Cho dan Chun (2016), Christensen (2016), Djuitaningsih dan Marsyah (2016), Gras-Gil, Manzano dan Fernandez (2016), Martinez-Ferrero dan Frias-Aceituno, (2016), Alsaadi, Madison, Hodson dan Langlois (2017), Garcia-Sanchez dan Garcia-Meca (2017) melakukan penelitian terhadap CSR dan berdasarkan hasil empiris, menyatakan manajemen laba sendiri berkorelasi negatif terhadap CSR *disclosure*. Penelitian diatas tidak sejalan dengan Prior, Surroca dan Tribo (2008) yang menemukan adanya hubungan positif, sedangkan Sukarmi (2008), Kim (2012), Terzaghi (2012), Salewski dan Zulch (2014), Tumewu dan Rudiawarni (2014)

tidak menemukan adanya korelasi yang signifikan antara kedua variabel tersebut. Maka penelitian ini mengambil hipotesis bahwa:

H₁ : Manajemen laba berpengaruh signifikan positif terhadap CSR *disclosure*.

2.3.2 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), penghindaran pajak diartikan sebagai pengurangan pajak sebenarnya dan mencakup berbagai strategi pajak. Mereka menyimpulkan bahwa pajak sebenarnya adalah biaya, dan perusahaan dapat mengelola serta merencanakan strategi pajak untuk mengurangi biaya yang menghasilkan profitabilitas yang lebih tinggi dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Penghindaran pajak dianggap sebagai peningkatan nilai bagi pemegang saham. Para manajer juga didorong untuk mempraktikkan upaya terbaik mereka dalam memaksimalkan kekayaan pemegang saham dengan meminimalkan pajak (Christensen & Murphy, 2004).

Sehubungan dengan penghindaran pajak, kekurangan yang dihasilkan dalam pendapatan pajak perusahaan menimbulkan masalah, reputasi rusak, kemungkinan penghentian bisnis serta kerugian yang signifikan dan hilangnya kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, teori-teori pemangku kepentingan menunjukkan bahwa sebuah perusahaan berusaha untuk melegitimasi dan mempertahankan hubungannya dalam kegiatan operasionalnya, dengan cara praktik CSR dan melepaskan kewajibannya untuk mengungkapkan sifat dari kegiatannya dengan maksud memperoleh kembali kepercayaan para pemangku kepentingan (Gray, Kouhy & Lavers, 1995).

Penghindaran pajak merupakan faktor signifikan dalam menambah perhatian publik terhadap perusahaan. Ketidakmampuan suatu perusahaan untuk membayar bagian pajaknya yang adil, akan menarik perhatian masyarakat karena mencuri kemampuan pemerintah untuk membiayai barang publik. Penghindaran pajak juga merupakan bagian dari masalah keagenan, terutama karena fakta bahwa manajer irasional memiliki kesempatan untuk mengelola kepentingan diri sendiri dengan menghindari pajak seperti yang diarahkan oleh pemegang saham. Perusahaan dapat mengelola biaya yang diharapkan terkait dengan praktik

penghindaran pajak dan juga dapat mengelola reputasi mereka dengan meningkatkan kegiatan CSR mereka atau mengurangi perilaku tidak bertanggung jawab (Sikka, 2010).

Octaviana dan Rohman (2014) melakukan penelitian dengan menunjukkan hasil bahwa semakin rendah penghindaran pajak maka pengungkapan CSR semakin tinggi. Schon (2008), Watson (2011), Huseynov dan Klamm (2012), Davis (2013), Lanis dan Richardson (2013), Zhang (2013), Oktaviana (2014), Utari (2014), Elbaz (2015), Dharma dan Noviari (2017) menunjukkan hasil penelitian bahwa entitas yang tidak banyak melakukan praktik penghindaran pajak sebagai bentuk tindakan bertanggung jawab secara sosial, akan melakukan aktivitas CSR lebih tinggi. Hasil penelitian tersebut, tidak konsisten dengan penelitian Hansen (2015), Villafuerte (2015). Maka hipotesis yang diambil untuk penelitian ini adalah:

H₂ : Penghindaran pajak berpengaruh signifikan positif terhadap CSR *disclosure*.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Persentase saham dipegang oleh manajemen yang secara aktif berpartisipasi mengambil suatu kebijakan termasuk para komisaris dan direktur perusahaan dapat diartikan sebagai kepemilikan manajerial. Pemegang saham manajerial sangat memungkinkan manajer yang akan mendominasi perusahaan dan menjadi penentu keputusan kebijakan serta strategi mana yang akan diambil perusahaan, karena dalam kasus ini manajer juga bertindak sebagai pemegang saham. Berdasarkan teori *stakeholder*, semakin besar pemegang saham manajerial di suatu entitas akan membuat kinerja manajer lebih produktif untuk meningkatkan nilai perusahaan. Manajer perusahaan akan berusaha untuk mengungkapkan CSR dengan tujuan agar informasi tersebut dapat menaikkan citra perusahaan (Khan dan Muttakin, 2013).

Gray (1988), Sembiring (2005), Rosmasita (2007), Oliveira dan Ferreira (2011), Dewi (2013), Eriandani (2013), Udayana (2013), Paramita dan Marsono (2014), Prakasa (2016), Rahayu (2016) serta Masyitah (2016) melakukan

penelitian kepemilikan manajerial terhadap CSR *disclosure* dan mendapatkan hasil yang positif. Sedangkan hasil penelitian Huafang dan Jinguo (2007), Rustiarini (2008), Said (2009), Mulia (2010), Waryanto (2010), Badjuri (2011), Tamba (2011), Nur dan Priantinah (2012), Terzhagi (2012), Laksmitaningrum dan Purwanto (2013), Martua dan Nasir (2013), Djuitaningsih dan Marsyah (2016), Swandari (2016), Saputro (2019) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap CSR *disclosure*. Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya masih tidak konsisten antar para peneliti, maka hipotesis yang diambil adalah:

H₃ : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap CSR *disclosure*.

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Kepemilikan institusional biasanya merupakan pemegang saham terbesar dalam suatu entitas. Saham tersebut dimiliki lembaga institusi yaitu bank, perseroan terbatas, perusahaan investasi, serta institusi-institusi lain. Investor institusional dapat memonitor manajemen perusahaan, sehingga pemegang saham dapat meminta pihak manajemen melakukan pengungkapan CSR pada laporan tahunan guna transparansi terhadap pemangku kepentingan agar nilai perusahaan juga ikut meningkat (Laksmitaningrum & Purwanto, 2013).

Pemegang saham institusi yang besar pada suatu entitas, akan melakukan kegiatan CSR dan melaporkannya pada laporan tahunan guna meningkatkan nama baik perusahaan dan nilai perusahaan. Keterlibatan entitas terhadap aktivitas CSR tersebut, nantinya akan memberikan manfaat jangka panjang kepada pemegang saham institusi (Fauzi, Mahoney & Rahman, 2007).

Pernyataan penelitian Fauzi *et al.* (2007), Mahoney (2007), Rahman (2007), Machmud dan Djaman (2008), Utami dan Rahmawati (2010), Nilasari (2011), Rahkmawati (2011), Eriandani (2013), Saraswati dan Hadiprajitno (2013), Tumewu dan Rudiawarni (2014), Djuitaningsih dan Marsyah (2016) tentang korelasi kepemilikan institusional terhadap CSR mendapatkan hasil yang tidak signifikan, akan tetapi Angraini (2006), Nofandrilla (2008), Saleh (2010), Yulia

dan Paramitha (2011), Sari (2013), Sukoharsono (2013), Sutrisno (2013), Soliman (2013), Udayana (2013), Saputro (2019) menarik kesimpulan yang berbeda yaitu adanya hubungan kepemilikan institusional dalam *CSR disclosure*. Maka hipotesis yang digunakan adalah:

H₄ : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *CSR disclosure*.

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Kepemilikan asing dinyatakan berdasarkan persentase pemegang saham di perusahaan Indonesia yang dimiliki oleh individu ataupun lembaga asing. Melakukan investasi di negara lain pastinya memiliki risiko bisnis lebih tinggi dikarenakan sosial, lingkungan, budaya dan juga ekonomi yang berbeda serta perbedaan informasi yang diberikan oleh pihak lain. Dengan semakin tinggi investasi saham dimiliki pihak luar, maka akan meningkatkan juga risiko yang akan ditanggung oleh pihak asing. Investor asing dalam mempertimbangkan pengambilan keputusan investasi, pastinya akan berinvestasi pada entitas yang selama ini dikenal baik serta memiliki nama baik dalam pelanggan, pencegahan dan pengendalian korupsi, praktik ketenagakerjaan, manajemen yang layak dan juga dinilai lebih bertanggung jawab dalam kontrol kualitas dan keamanan produk. Bertujuan untuk meminimalkan risiko bisnis karena perbedaan tersebut (Cahyani & Suryaningsih, 2016).

Menurut Susanti (2013), faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan *CSR disclosure* adalah kepemilikan asing. Dorongan ini dikarenakan pelatihan akuntansi yang lebih memadai dan entitas asing juga memiliki pengetahuan sistem informasi yang lebih baik dalam menjawab kebutuhan internal dan perusahaan induk. Emiten asing tampaknya lebih siap dalam menangani tuntutan yang lebih besar dalam hal pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum.

CSR disclosure umumnya lebih tinggi ketika adanya kepemilikan asing, dikarenakan adanya pemisahan antara pemilik dan manajemen secara geografis, serta kebanyakan pemilik asing memiliki proporsi saham yang lebih besar.

Menurut riset penelitian dari negara asing terutama Eropa dan Amerika, dapat diketahui negara asing tersebut adalah negara yang selalu memperhatikan isu-isu sosial, seperti pendidikan, ketenagakerjaan, limbah, pencemaran lingkungan, efek rumah kaca dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Bukan hanya itu, investor asing cenderung mempunyai pengetahuan dan penentuan nilai yang berbeda karena *exposure market* luar negeri (Bradbury, 1991).

Kepemilikan asing memiliki korelasi positif terhadap *CSR disclosure* pada penelitian yang dilakukan oleh Chang (2003), Chapple dan Moon (2005), Tanimoto dan Suzuki (2005), Kim (2007), Darus (2009), Puspitasari (2009), Said (2009), Saleh (2010), Oh (2011), Tamba (2011), Khan dan Muttakin (2013), Soliman (2013), Sufian dan Zahan (2013), Sissandhy (2014), Dewi (2015), Isa dan Muhammad (2015), dimana dorongan *CSR disclosure* akan meningkat saat perusahaan memiliki kepemilikan asing yang besar. Penelitian Marwata (2006), Djakman (2008), Machmud (2008), Anggraini (2010), Diba (2012), Amelia (2013) bertentangan dengan beberapa peneliti diatas yang menyatakan bahwa tidak adanya korelasi signifikan terhadap *CSR disclosure* di Indonesia. Maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H₅ : Kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap *CSR disclosure*.

2.3.6 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

Teori agensi mengklaim bahwa ukuran dewan direksi yang besar akan membantu mengurangi biaya agensi dengan melaksanakan kegiatan yang lebih bertanggung jawab secara sosial, terutama pada saat krisis dan perubahan peraturan. Oleh karena itu, dewan direksi merupakan komponen penting dari mekanisme tata kelola perusahaan untuk mengatur operasi bisnis secara adil dan dengan cara yang tepat. Konsisten dengan teori pemangku kepentingan, keputusan dewan yang berkaitan dengan praktik pengungkapan CSR harus menyeimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan (Said, 2009).

Representasi di dewan dapat memberikan masukan bermanfaat bagi pemangku kepentingan terhadap keputusan di tingkat dewan dan membantu

dewan merespon lebih baik terhadap ketergantungan sumber daya yang dihadapi perusahaan. Karena pemangku kepentingan biasanya meminta transparansi yang lebih besar, perwakilan mereka yang lebih luas cenderung memiliki efek positif pada kebijakan pengungkapan CSR. Semakin besarnya jumlah dari dewan direksi, maka kemampuan perusahaan dapat melaksanakan CSR juga semakin tinggi (Ali & Atan, 2013).

Prastiwi (2011), Suryono (2011), Esa dan Ghazali (2012), Pebriana (2012), Ali dan Atan (2013), Abdelkader (2016) melakukan penelitian ukuran direksi terhadap CSR *disclosure* dan mendapatkan korelasi positif antar kedua variabel. Sedangkan Intan (2016) dan Sadou (2017) menarik kesimpulan yang menunjukkan ukuran direksi tidak berkorelasi signifikan terhadap CSR *disclosure* di Indonesia. Berdasarkan penelitian variabel sebelumnya, terdapat konsistensi yang belum jelas, maka hipotesis yang diambil adalah:

H₆ : Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap CSR *disclosure*.

2.3.7 Pengaruh Direktur Independen terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure

Menurut MCCG 2012, direktur independen dapat diartikan sebagai seorang yang tidak mempunyai kaitan dengan perusahaan, baik itu merupakan anak perusahaan terkait, atau perusahaan induk dan memiliki setidaknya 10 persen kepemilikan saham. Berdasarkan teori keagenan, direktur independen yang tidak berurutan dapat mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab secara sosial untuk menghadapi perubahan peraturan dan krisis perusahaan. Kehadiran direksi independen pada dewan direksi dianggap sebagai pantauan cara kerja atau bagaimana suatu perusahaan beroperasi terhadap tata kelola perusahaan. Secara umum diyakini bahwa direktur luar yang independen dapat mendorong dewan menjadi lebih diperkuat dengan selalu mengawasi kegiatan manajemen dan berupaya menjaga kepentingan semua investor agar terlindungi (Petra, 2005).

Sebuah riset yang dilakukan oleh Harjoto dan Jo (2011) melaporkan dewan independensi berkorelasi terhadap pengungkapan CSR. Rouf (2010), Arfiur (2012), Muttakin dan Subramaniam (2015), Dias *et al.* (2017), Naseem

(2017), Sadou (2017) memiliki pandangan sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa direktur independen berkorelasi positif terhadap CSR *disclosure*. Namun penelitian Rahman dan Widyasari (2008), Saravanan (2009), Martin (2012), Rahman dan Ismail (2016) bertentangan dengan para peneliti sebelumnya yang menunjukkan bahwa direktur independen tidak berkorelasi terhadap CSR *disclosure*. Dengan uraian diatas, terdapat konsistensi yang belum jelas mengenai hubungan direktur independen terhadap CSR, maka hipotesis yang diusulkan adalah:

H₇ : Direktur independen berpengaruh signifikan positif terhadap CSR *disclosure*.

2.3.8 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Corporate Social Responsibility Disclosure

Perwakilan pemegang saham dalam suatu badan usaha dan dimasukkan ke dalam PT merupakan definisi dari komisaris. Dewan komisaris berfungsi untuk membantu memantau manajemen perusahaan yang dipegang oleh para dewan direksi serta membantu menentukan bahwa manajemen perusahaan telah benar menjalankan tugas dalam pengembangan perusahaan dan melakukan kontrol internal di dalam perusahaan. Salah satu tujuan adanya pengawasan komisaris adalah untuk memastikan bahwa operasi perusahaan legal serta terhindar dari pelanggaran UU dan peraturan yang berlaku, sebagai tanda kepatuhan yang dilakukan perusahaan terhadap produk dan layanan, lingkungan serta bidang lainnya (Nur & Priantinah, 2012).

Hal ini dapat membantu perusahaan terhindar dari risiko yang dapat merugikan perusahaan ketika melanggar peraturan yang berlaku, baik itu secara langsung melalui sanksi, denda ataupun risiko secara tidak langsung seperti rusaknya nama baik perusahaan, yang dikarenakan kelak melakukan kegiatan yang melanggar hukum. Oleh sebab itu, dewan komisaris akan mendorong manajemen perusahaan melakukan CSR *disclosure* dengan cara yang lebih jelas (Nur & Priantinah, 2012).

Anggota dewan komisaris yang besar juga akan meningkatkan kesempatan untuk mengendalikan direksi dan meningkatkan kemudahan dalam

pengawasan perusahaan serta direksi. Besarnya dorongan dari para dewan komisaris terhadap CSR *disclosure*, maka secara bersamaan juga akan menekan manajemen untuk lebih banyak mengungkapkan CSR (Coller & Gregory, 2005).

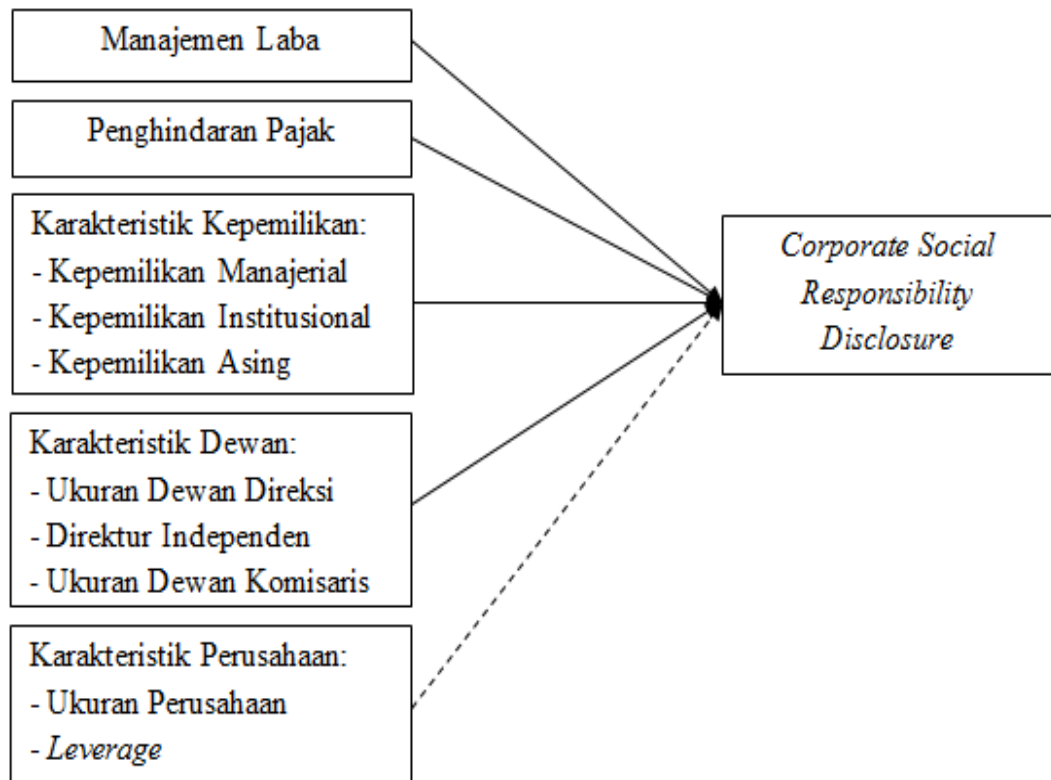
Pada riset lapangan yang dilakukan Mulyadi (2012) mengemukakan dengan adanya pengawasan dari dewan komisaris dapat mendorong manajemen perusahaan agar mengungkapkan informasi-informasi CSR yang lebih terbuka kepada publik. Dengan pengungkapan CSR, maka tujuan perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari pemangku kepentingan, bisa terwujud.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Coller dan Gregory (1999), Muntoro (2006), Sembiring (2005), Sulastini (2007), Andayani (2008), Sitepu dan Siregar (2008), Dewi (2013), Amalia (2013), Laksmitaningrum dan Purwanto (2013) menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh signifikan terhadap CSR *disclosure*. Sedangkan Ahmad (2003), Matoussi (2008), Chakroun (2008), Handajani (2009), Said (2009), Fahrizqi (2010), Waryanto (2010), Effendi (2012), Udayana (2013), Komalasari (2014), Sari (2014), Djuitaningsih dan Marsyah (2016) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh antara kedua variabel tersebut. Dari uraian diatas, bahwa masih kurangnya konsistensi yang jelas antar peneliti, maka hipotesis yang diambil adalah:

H₈ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap CSR *disclosure*.

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis

Model penelitian ini mengadopsi model penelitian Esa dan Ghazali (2012), Laksmitaningrum dan Purwato (2013), Villafuerte (2015) dan Rahayu dan Darmawan (2017). Model penelitian yang diajukan oleh peneliti untuk penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.23 Model penelitian pengaruh manajemen laba, penghindaran pajak dan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap CSR disclosure.